

ABSTRAK

Kesejahteraan merupakan kondisi manusia di mana orang-orangnya ada dalam kondisi makmur dengan keadaan sehat dan damai. Di dalam kesejahteraan pasti berhubungan erat dengan keadilan pekerja/buruh sesuai dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pada hakikatnya keadilan adalah kata sifat yang bermakna adil dan tidak berat sebelah. Selain itu kesejahteraan juga tidak lepas dari adanya kebijakan nasional yang dibuat oleh pemerintah. Kebijakan pemerintah selalu berimplikasi pada masyarakat baik itu pada hal positif atau negatif. Jika suatu kebijakan tidak sesuai dengan pola, sistem dan kondisi masyarakat, sebagian besar masyarakat menolak dengan hal tersebut. Salah satu dampak negatifnya adalah kondisi usaha perekonomian yang semakin memburuk. Dilihat dari hal tersebut, perusahaan berhak untuk menutup usahanya baik secara sementara atau tetap, sehingga Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) menjadi alternatif terakhir yang diambil pengusaha untuk menyelamatkan usahanya. Bagi pekerja/buruh Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) merupakan masalah yang kompleks, karena pekerja/buruh kehilangan pendapatan. Di dalam permasalahan Penulisan Hukum ini adalah mengenai bentuk implikasi dan tanggung jawab pemerintah serta pemilik usaha atas kebijakan larangan penggunaan kapal cantrang sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor. 71 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor. 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, terhadap kesejahteraan anak buah kapal setelah terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Kabupaten Pati.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, dilakukan dengan cara deskriptif analitis dan metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian ini dilihat dari implikasi kebijakan larangan penggunaan kapal cantrang telah mengakibatkan menurunnya tingkat kesejahteraan anak buah kapal beserta keluarga setelah dilakukannya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh pemilik usaha penangkapan ikan di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Hal ini disebabkan oleh kapal-kapal yang dilarang melaut sampai mengganti alat tangkap cantrang yang dinilai dapat merusak sumber daya alam (SDA) laut di Indonesia. Langkah-langkah yang ditempuh oleh pemerintah yaitu menyediakan lembaga keuangan mikro, program perlindungan anak buah kapal dan pengembangan usaha perikanan di Indonesia.

Pemerintah di dalam memberlakukan kebijakan harus mengantisipasi dari akibat dari peraturan yang telah dibuat. Terdapat banyak faktor yang harus diperhatikan oleh pemerintah jika kebijakan ini diberlakukan secara terus-menerus, tanpa antisipasi yang baik dan belum tepat pada pekerjaan di bidang kelautan dan perikanan. Pemberdayaan anak buah kapal harus digalakkan oleh pemerintah baik itu melalui perjanjian kerja laut untuk kepentingan perlindungan hukumnya dan mengenai langkah-langkah yang harus diambil pemerintah untuk dapat meningkatkan kesejahteraan anak buah kapal beserta keluarganya.

Kata Kunci : Kebijakan Larangan Penggunaan Kapal Cantrang, Kesejahteraan, Anak Buah Kapal, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

ABSTRACT

Condition of welfare which the people are in a prosperous condition with wealthy and peaceful state. A community became prosperous by working both inside and outside in the company. The welfare might be closely related to labor justice in accordance with Law No. 13 of 2003 concerning employment, in the name of justice is an adjective that means fair and impartial. In addition, welfare is also inseparable from the existence of national policies made by the government. Government policies always have implications for the community whether positive or negative conditions. If a policy is not in accordance with the patterns, systems and conditions of the community, most people reject or contravene the policy. One negative impact is the deteriorating economic condition of the business. The company has the right to close its business either temporarily or permanently, so that Termination of Employment (PHK) becomes the last alternative taken by the entrepreneur to save his business. For workers / labor Termination of Employment is a complex problem, because workers / laborers lose their income. On the problem statement of this writing the Law is about the form of implications and responsibilities of the government and business owners for the policy of prohibiting the use of cantrang vessels as stipulated in the Minister of Maritime Affairs and Fisheries Regulation Number. 71 of 2016 concerning Amendments to the Minister of Maritime Affairs and Fisheries Regulation Number. 2 of 2015 concerning Management of the Fisheries of the Republic of Indonesia, towards the welfare of crew members after the Termination of Employment (PHK) in Pati Regency.

This research is using empirical juridical approach method, using analytical descriptive method and the data analysis method using a qualitative method. The results of this study obtained that, the policy implications of the prohibition on the use of cantrang vessels have resulted in a decrease in the level of welfare ship crews and their families after the Termination of Employment (PHK) by fishing business owners in Pati Regency, Central Java. This is caused by ships that are prohibited from going to sea until business owners replace cantrang fishing which is considered damaging marine natural resources in Indonesia. The steps taken by the government are providing microfinance institutions, ship crew protection and fisheries business development in Indonesia.

The government in implementing policies must anticipate the consequences of the regulations that have been made. There are many factors that must be considered by the government if this policy is implemented continuously, without good anticipation and has not been right on the work in the field of marine and fisheries, especially as a crew. Empowerment of crew members must be encouraged by the government both through sea work agreements in the interests of legal protection and steps that must be taken by the government to improve the welfare of crew members and their families.

Keywords : Cantrang Vessels Prohibition, Welfare, Shipmen, Termination Of Work